



# LAKIP TAHUN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**DINAS PERIKANAN**

**Jl. Letkol Pol. Toegino-Kuala Tungkal, Tlp/Fax. 0742 21023**  
**Email : [diskan.tanjabarkab@gmail.com](mailto:diskan.tanjabarkab@gmail.com)**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Khadirat Ilahi Robbi, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan LAKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2020 yang mengacu kepada Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

Secara yuridis formal Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Januari 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Paraf	
Sekretaris	
Kasubbag	

  
**Ir. NETTY MARTINI, M.Sc.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650913 199703 2 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan keniscayaan yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LAKIP adalah sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan kepada publik, yang merupakan sarana evaluasi atas capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan visi dan misinya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung barat selama tahun 2020. Berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, capaian kinerja tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung barat dalam tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	2
1.4. Aspek strategis.....	7
1.5. Landasan Hukum .....	12
1.6. Maksud dan Tujuan .....	15
1.7. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA</b> .....	17
2.1. Rencana Strategis.....	17
2.2. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) .....	18
2.3. Kebijakan dan Program .....	19
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	22
3.1. Gambaran Umum .....	22
3.2. Pengukuran Kinerja .....	22
3.3. Prestasi IKU.....	24
3.4. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	39
3.5. Realisasi Anggaran.....	50
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	59
<b>LAMPIRAN</b> .....	61

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1. Analisis Penetapan Strategi Organisasi.....	9
2. Tabel 2.1. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) DPK Tahun 2019 .....	19
3. Tabel 3.1. Target dan Capaian IKU Diskan Tahun 2019 .....	38
4. Tabel 3.2. Target dan Realisasi IKU Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 2019 .....	39
5. Tabel 3.3. Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 2014-2019.....	40
6. Tabel 3.4. Target dan Realisasi IKU Perikanan Budidaya Tahun 2019.....	42
7. Tabel 3.5. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2014-2019 .....	42
8. Tabel 3.6. Target dan Realisasi IKU Jumlah Produksi Benih Ikan Tahun 2019 .....	44
9. Tabel 3.7. Perkembangan Jumlah Produksi Benih Ikan 2014-2019.....	44
10. Tabel 3.8. Target dan Realisasi IKU Jumlah Kelompok yang Menerapkan Teknologi Perikanan Tahun 2019.....	46
11. Tabel 3.9. Target dan Realisasi IKU Jumlah Konsumsi Ikan Tahun 2019.....	47
12. Tabel 3.10. Perkembangan Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014-2019.....	48
13. Tabel 3.11. Target dan Realisasi IKU Jumlah Kawasan Reservat/Lubuk Larangan Baru Tahun 2019 .....	49
14. Tabel 3.12. Rincian Anggaran dan Capaian Keuangan Dinas Perikanan Tahun 2019 .....	50
15. Tabel 3.13. Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2014-2019 .....	51
16. Tabel 3.14. Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2019 .....	52
17. Tabel 3.15. analisis Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2019.....	53
18. Tabel 3.16. Pengukuran Efisiensi Keuangan Tahun Anggaran 2019.....	56

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1. Struktur Organisasi Tahun 2019 ..... 4
2. Gambar 3.1. Grafik Pola Penyerapan Anggaran Tahun 2019 ..... 50
3. Gambar 3.2. Grafik Pertumbuhan Realisasi Anggaran Tahun 2014-2019 ..... 51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan tahun kelima kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sekaligus merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Kabupaten di Bidang perikanan dan kelautan. Pembangunan perikanan dan kelautan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan) dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan). Arah kebijakan Dinas Perikanan tahun 2020 tidak berubah pada tahun-tahun sebelumnya, meliputi (1) Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan guna mendukung peningkatan produksi perikanan dan kelautan, (2) Peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat perikanan menuju keamanan produk perikanan dan kelautan, serta (3) Peningkatan Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang optimal dan berkelanjutan.

Sebagai acuan untuk mengarahkan pembangunan kelautan dan perikanan di lingkup Dinas Perikanan telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2016-2021 melalui Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 01.3 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung jabung Barat Tahun 2016-2021. Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut telah memuat indikator kinerja dan target yang diurai per tahun serta rencana indikasi pendanaannya.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, Dinas Perikanan sebagai unit kerja pemerintah semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas akuntabilitas, di mana setiap penyelenggaraan negara harus dapat mempertanggung jawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program dan kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

## 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Parturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah, yang menegaskan bahwa Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas Pokok *“melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang kelautan dan perikanan”*. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 1.3. Struktur Organisasi

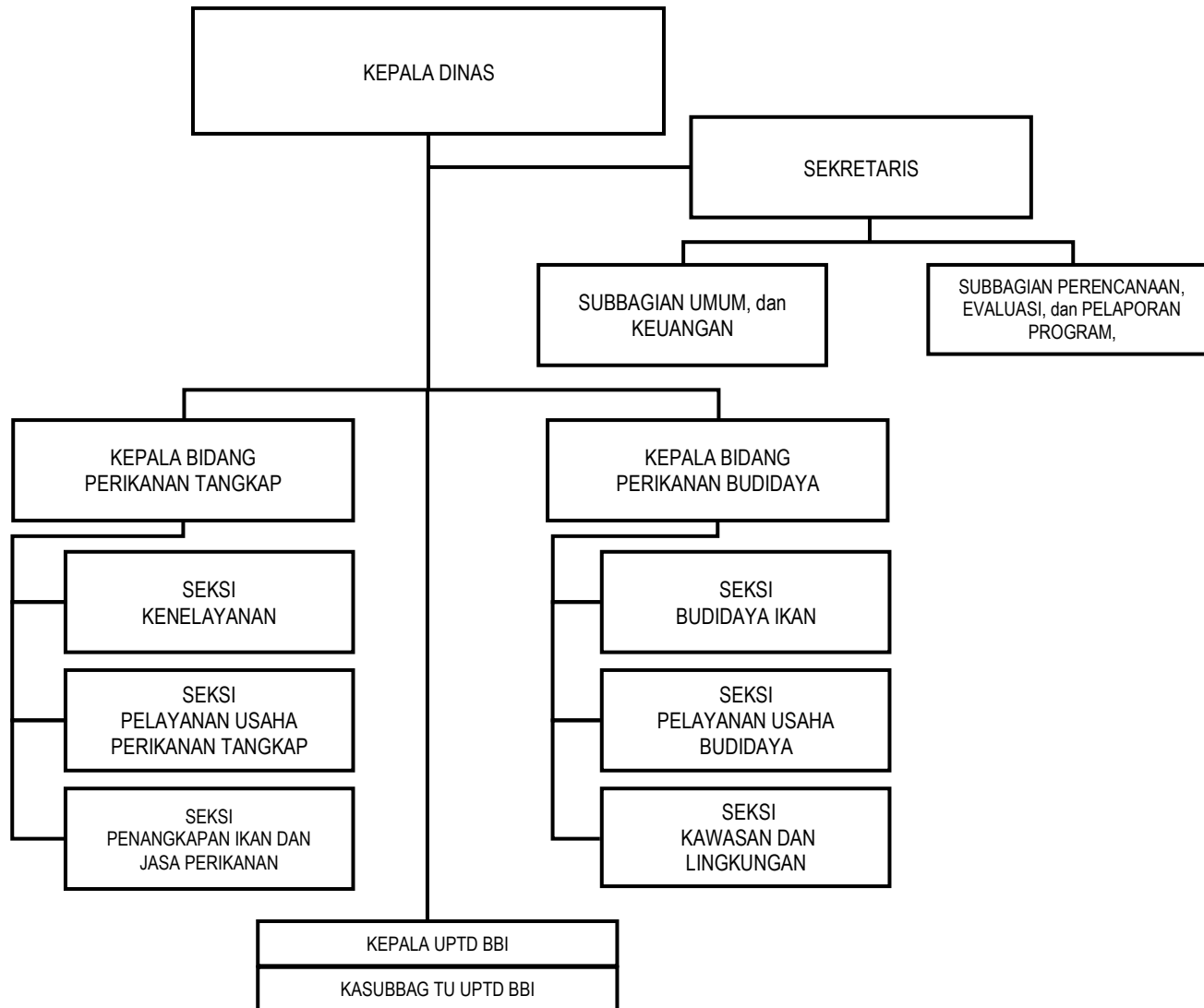
Bagian Tata Pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unit Perangkat Daerah Dinas Perikanan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Bagian Tata Pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas;
2. 1 (satu) orang Sekretaris;
3. 2 (dua) orang Kepala Bidang;
4. 2 (dua) orang Kasubbag;
5. 6 (enam) orang kasi;
6. 1 (satu) orang Kepala UPTD; dan
7. 1 (satu) Orang Kepala TU UPTD.



Setiap Bidang dibantu oleh staf/Fungsional Umum/Fungsional Tertentu sebagai unsur teknis pelaksana. Selengkapnya mengenai Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Gambar 1.1 :

**Gambar 1.1.**  
**Struktur Organisasi Dinas Perikanan**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**



Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibantu oleh Sekretaris dan 2 (dua) Kepala Bidang (Kabid), yaitu Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan 1 (satu) Kepala UPTD.

Pelaksanaan tugas Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan oleh satuan-satuan organisasi tersebut di atas, yaitu :

#### **1. Bagian Sekretariat**

Memberikan tugas pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sekretariat terdiri dari :

- a. Kasubbag Umum dan Keuangan
- b. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

#### **2. Bidang Perikanan Budidaya**

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan budidaya

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

- a. Kasi Budidaya Ikan
- b. Kasi Pelayanan Usaha Budidaya
- c. Kasi Kawasan dan Lingkungan

#### **3. Bidang Perikanan Tangkap**

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan tangkap

Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :

- a. Kasi Kenelayanan
- b. Kasi Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap
- c. Kasi Penangkapan Ikan dan Jasa Perikanan

#### **4. Kepala UPTD**

UPTD Perikanan Budidaya terdiri dari :

- a. Kepala TU UPTD

Selanjutnya sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai personil sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

- 1) Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. Golongan IV, sebanyak 3 Orang terdiri dari :
    - Golongan IV/c : 1 Orang
    - Golongan IV/b : 1 Orang
    - Golongan IV/a : 1 Orang
  - b. Golongan III, sebanyak 18 Orang terdiri dari :
    - Golongan III/d : 6 Orang
    - Golongan III/c : 6 Orang
    - Golongan III/b : 3 Orang
    - Golongan III/a : 3 Orang
  - c. Golongan II, sebanyak 3 Orang terdiri dari :
    - Golongan II/d : 3 Orang
    - Golongan II/c : 0 Orang
    - Golongan II/b : 0 Orang
- 2) Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. Pasca Sarjana (S2), sebanyak 1 Orang terdiri dari :
    - Master Science – M.Sc. : 1 Orang
  - b. Sarjana (S1), sebanyak 31 Orang terdiri dari :
    - Sarjana Perikanan : 16 Orang
    - Sarjana Ekonomi : 5 Orang
    - Sarjana Hukum : 1 Orang
    - Sarjana Pertanian : 3 Orang
    - Sarjana Peternakan : 1 Orang
    - Sarjana Pemerintahan : 1 Orang
    - Sarjana Pendidikan : 1 Orang
    - Sarjana Komunikasi : 2 Orang
    - Sarjana Sosial : 1 Orang

- c. Sarjana Muda (Diploma/DIII) sebanyak 1 Orang
  - d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 19 Orang
- 3) Menurut Eselon, Pegawai Dinas Perikanan kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Eselon II, sebanyak 1 Orang
  - b. Eselon III, sebanyak 3 Orang
  - c. Eselon IV, sebanyak 10 Orang
  - d. Non Eselon, sebanyak 44 Orang
- 4) Menurut Status Kepegawaian, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. PNS, sebanyak 24 Orang
  - b. Tenaga/Petugas Penunjang Kegiatan dengan Perjanjian (Kontrak) sebanyak 34 Orang

#### 1.4. Aspek Strategis

Untuk lebih memfokuskan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung di luar kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan metode atau teknik analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)* atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

##### 1. Kekuatan (strengths)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai visi dan misi, adalah :

- a) Dinas Perikanan adalah Dinas Teknis sebagai Pengelola Perikanan dan Kelautan.
- b) Adanya pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan (nelayan, pembudidaya ikan dan penampung/pengelola hasil perikanan).

- c) Sarana/prasarana yang dimiliki.
- d) SDM sesuai bidang tugas yang dimiliki.

## 2. Kelemahan (Weakness)

Beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis adalah :

- a) Rendahnya Penguasaan teknologi di bidang perikanan dan kelautan.
- b) Terbatasnya dana pembangunan bidang perikanan dan kelautan.
- c) Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki.
- d) Belum memadainya SDM secara kualitas maupun kuantitas.

## 3. Peluang (Opportunities)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a) Minat masyarakat pada usaha bidang Perikanan dan Kelautan.
- b) Potensi / sumberdaya usaha di bidang Perikanan dan Kelautan
- c) Minat Investor pada Bidang Perikanan dan Kelautan
- d) Dinamika keseimbangan Kelompok Tani Ikan dan Nelayan

## 4. Ancaman (Threats)

Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datang dari luar sistem organisasi/eksternal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan, diantaranya sebagai berikut :

- a) Era Globalisasi.
- b) Stabilitas Keamanan dan Rawan Bencana Alam
- c) Kurangnya modal usaha.
- d) Pola usaha yang masih tradisional.

### 1.5. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas pembangunan sektor perikanan dan kelautan, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sorolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5603);
  6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat Tahun 2017 Nomor 12);
17. Paeraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 65);
19. Peraturan Kepala Dinas Perikanan Nomor 64.1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Cascading dan Pohon Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020.



## 1.6. Maksud dan Tujuan

LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem AKIP.

Maksud dan tujuan LAKIP ini adalah sarana penyampaian pertanggung jawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan visi dan misinya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

## 1.7. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

Dalam Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam Bab ini diuraikan :

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;
  4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
  5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya;
  7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

# **PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

Dalam melaksanakan tugas pembangunan yang tertuang pada RPJMD 2016-2021 khususnya urusan Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan berdasarkan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016-2021 berpedoman pada Visi Kepala Daerah terpilih yaitu “Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas” serta mengacu pada misi ketiga yaitu “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Agroindustri dan Perikanan”.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, Dinas Perikanan telah melakukan upaya-upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi, yaitu berupa penggunaan metode/pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC), hal ini dilakukan untuk mengelola kinerja organisasi secara terukur dan terstruktur dengan penekanan pada empat perspektif yang saling berimbang dan di “*cascading*” (diturunkan) sampai level staff/individu (pegawai). Dinas Perikanan melakukan penerapan pengelolaan kinerja tersebut secara penuh, termasuk melakukan penyempurnaan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik. Adapun upaya perbaikan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan riveu Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016 – 2021 dengan memetakan peta strategi dan indikator kinerja dengan tiga Sasaran Strategis (SS) dan sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan perikanan dan kelautan.
- 2) Penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020, sebagai perjanjian kinerja antara Bupati dengan Kepala Dinas dan berjenjang antara Eselon II dengan Eselon III dan Eselon IV.
- 3) Memperkuat sistem monitoring capaian kinerja dinas, termasuk didalamnya sistem pengumpulan data kinerja.
- 4) *Cascading* Sasaran Strategis dan indikator kinerja sampai level individu/staf.
- 5) Penerapan sistem penilaian kinerja individu/pegawai berbasis informasi dan Teknologi.

### **2.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2016 - 2021**

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah mulai dari eselon III, dan eselon II keatas wajib menetapkan/merumuskan rencana strategis.

Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, saran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon II, telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan *Stakeholder*.

Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai unsur staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, agar berdaya guna dan berhasil guna, efisien dan efektif perlu mempunyai suatu Visi untuk menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam perancangan Renstra secara menyeluruh. Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang terintegrasikan secara sinergis dalam melaksanakan amanat institusional.

## **2.2. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020**

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Penetapan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Secara terinci, IKU pembangunan kelautan dan perikanan dari sasaran strategis di atas beserta targetnya pada tahun 2020, sebagaimana pada Tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Dinas Perikanan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan (NTN dan NTPi)	2%	$INTN = (IYt/IEt) \times 100 \%$ $IYt = (Yt/Ytd) \times 100 \%$ $IEt = (Et/Etd) \times 100 \%$ Dimana : INTN = indeks nilai tukar nelayan periode t IYt = indeks total pendapatan keluarga nelayan periode t Yt = total pendapatan keluarga nelayan periode t (harga bulan berlaku) Ytd = total pendapatan keluarga nelayan periode dasar (harga bulan dasar) IEt = indeks total pengeluaran keluarga nelayan periode t Et = total pengeluaran keluarga nelayan periode t Etd = total pengeluaran keluarga nelayan periode dasar t = periode (bulan, tahun, dll) sekarang td = periode dasar (bulan, tahun, dll). Dalam perhitungan ini INTN tahun dasar = 100
		Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan	3%	Jumlah Produksi Tahun n x 100% dibagi jumlah produksi tahun-n
		Persentase Peningkatan Jumlah Konsumsi Ikan	3%	Ketersediaan Ikan/Jumlah Penduduk
		Persentase Peningkatan Kelas Kelompok (dari Pemula Menjadi Madya)	30%	Jumlah Kelompok yang naik kelas pada tahun n x 100% dibagi jumlah kelompok yang naik kelas pada tahun -n
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Dinas Perikanan	3,50	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total unsur yang terisi x Nilai penimbang
		Persentase Penurunan Hasil Pemeriksaan	10%	Jumlah temuan tahun n x 100% dibagi jumlah temuan tahun -n
		Nilai AKIP Dinas Perikanan	65	Hasil Evaluasi AKIP sesuai dengan PERMENPAN No 20/2013 tentang Juklak Evaluasi AKIP

## 2.3. Kebijakan dan Program

### 2.3.1. Kebijakan

Pelaksanaan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan di daerah ini disesuaikan dengan sumberdaya serta kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga dari hasil pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan kelautan, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kuantitas dan kualitas taraf hidup pelaku usaha perikanan dan kelautan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun kebijakan pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- 1) Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan guna mendukung peningkatan produksi perikanan dan kelautan.
- 2) Peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat perikanan menuju hasil perikanan dan kelautan yang tangguh.

- 3) Peningkatan Pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang optimal dan berkelanjutan.

### **2.3.2. Program Dinas Perikanan**

Untuk mewujudkan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Dinas Perikanan Tahun 2020, Pembangunan Perikanan dan Kelautan tersebut diimplementasikan kedalam 7 program sebagai berikut:

#### **2.3.2.1. Program Rutin**

##### **2.3.2.1.1. Program Pelayanan Administrasi**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- Penyediaan Jasa kebersihan kantor;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan;
- Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- Penyediaan Makanan dan Minuman;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

##### **2.3.2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

##### **2.3.2.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

##### **2.3.2.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- Pengembangan SDM.

- 2.3.2.1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja;
  - Pengumpulan dan Pengolahan Data-Data Statistik Perikanan.

### **2.3.2.2. Program Teknis**

- 2.3.2.2.1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan;
  - Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Air Payau;
  - Pengembangan sumberdaya Manusia Perikanan Budidaya;
  - Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) Pembengis dan UPBAP Tj. Labu.
  - Pengawasan Hama Penyakit dan Lingkungan;
  - Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan POKDAKAN; dan
  - Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar dan Air Payau.
- 2.3.2.2.2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
  - Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan;
- 2.3.2.2.3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - Promosi dan Publikasi Kegiatan Sektor Perikanan dan Kelautan;
- 2.3.2.2.4. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan;
  - Pembinaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1. Gambaran Umum**

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pelaksana sebahagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintah Kabupaten di bidang kelautan dan perikanan. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, Sasaran, Program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

### **3.2. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian



Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari **Input**, **Output**, dan **Outcome**. Sedangkan pencapaian Indikator Makro dilakukan dengan membandingkan Target dan Realisasi Indikator Makro.

### 3.2.1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator Masukan (*input*), Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

### 3.2.2. Indikator Kinerja Sasaran/Pengukuran Pencapaian Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

### 3.2.3. Indikator Kinerja Kegiatan/Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- a) Masukan (*input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- b) Keluaran (*output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- c) Hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keseluruhan kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

### 3.3. Prestasi IKU Tahun 2020

Metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja adalah realisasi indikator dibandingkan dengan target indikator dikalikan 100 persen. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

1. Sangat berhasil : jika capaian kinerja > 100%
2. Berhasil : 80-100%
3. Cukup Berhasil : 60-79%
4. Tidak Berhasil : < 60%

Tabel 3. 1. Penjelasan Hasil Perhitungan Capaian Kinerja Dinas Perikanan

Indikator Kinerja	Target	Keterangan
Persentase Peningkatan Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan (NTN dan NTPi)	2%	Semakin besar Indeks Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan, maka Peningkatan ekonomi Pelaku usaha perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan) semakin meningkat
Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan	3%	Semakin besar capaian jumlah produksi perikanan, maka ketersediaan sumber protein hewani sudah terpenuhi bagi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik
Persentase Peningkatan Jumlah Konsumsi Ikan	3%	Semakin besar jumlah konsumsi ikan, maka ketersediaan ikan konsumsi sudah terpenuhi oleh masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik
Persentase Peningkatan Kelas Kelompok (dari Pemula Menjadi Madya)	30%	Semakin meningkatnya jumlah kelompok yang naik kelas dari pemula menjadi madya, maka semakin baik kinerja dinas
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Perikanan	3,50	Semakin tinggi kepuasan masyarakat, maka pelayanan dinas menunjukkan kinerja yang baik
Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan	10%	Semakin kecil temuan hasil pemeriksaan, maka pengelolaan keuangan dan asset daerah sudah memenuhi aturan yang berlaku, sehingga capaian kinerja semakin baik
Nilai AKIP Dinas Perikanan	65	Semakin besar capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka kinerja SKPD semakin efektif efisien.

Tabel 3. 2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Persentase	Realisasi 2019
1.1.	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	<b>Persentase Peningkatan Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan (NTN dan NTPi)</b>	<b>2</b>	<b>1,13</b>	<b>56,50</b>	<b>1,89</b>
		NTN	107,20	110,11	102,71	117,89
		NTPi	98,60	98,16	99,55	95,68
		<b>Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan</b>	<b>3</b>	<b>1,62</b>	<b>54,00</b>	<b>0,89</b>
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	26.884	22.442,00	83,48	21.901,00
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	2.150	1.135,00	52,79	1.295,00
		<b>Persentase Peningkatan Jumlah Konsumsi Ikan</b>	<b>3</b>	<b>6,26</b>	<b>208,67</b>	<b>2,83</b>
		Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/Tahun)	33,93	35,79	105,48	33,68
		<b>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok (dari Pemula Menjadi Madya)</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>83,33</b>	<b>85,00</b>
		1.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Perikanan</b>	<b>3,50</b>	<b>3,12</b>
<b>Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan</b>	<b>10</b>			<b>12</b>	<b>120,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Nilai AKIP Dinas Perikanan</b>	<b>65</b>			<b>68,86</b>	<b>105,94</b>	<b>68,86</b>

### 3.4. Evaluasi dan Analisis Kinerja

#### 3.4.1. Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Terdapat empat Indikator Kinerja dengan prestasi kerjanya sebagaimana uraian tersebut :

##### 1) Persentase Peningkatan Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan (NTN dan NTPi)

Nilai tukar dapat digunakan untuk keperluan dua macam analisis. Penggunaan yang pertama adalah sebagai alat deskripsi (*descriptive tool*). Sebagai alat deskripsi konsep ini digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan secara statistik atau indeks mengenai kecenderungan jangka pendek dan jangka panjang tentang sejarah kelakuan harga barang-barang yang diperdagangkan. Penggunaan yang kedua yang sangat erat hubungannya dengan yang pertama, adalah sebagai alat untuk keperluan penetapan kebijakan (*tool for policy*).

Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan (nelayan dan pembudidaya) tahun 2020 bila digabungkan sebesar 107,37 atau sebesar 1,13% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa secara umum pelaku usaha perikanan dapat memenuhi kebutuhan

subsistennya, walau belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 2%. Rincian indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

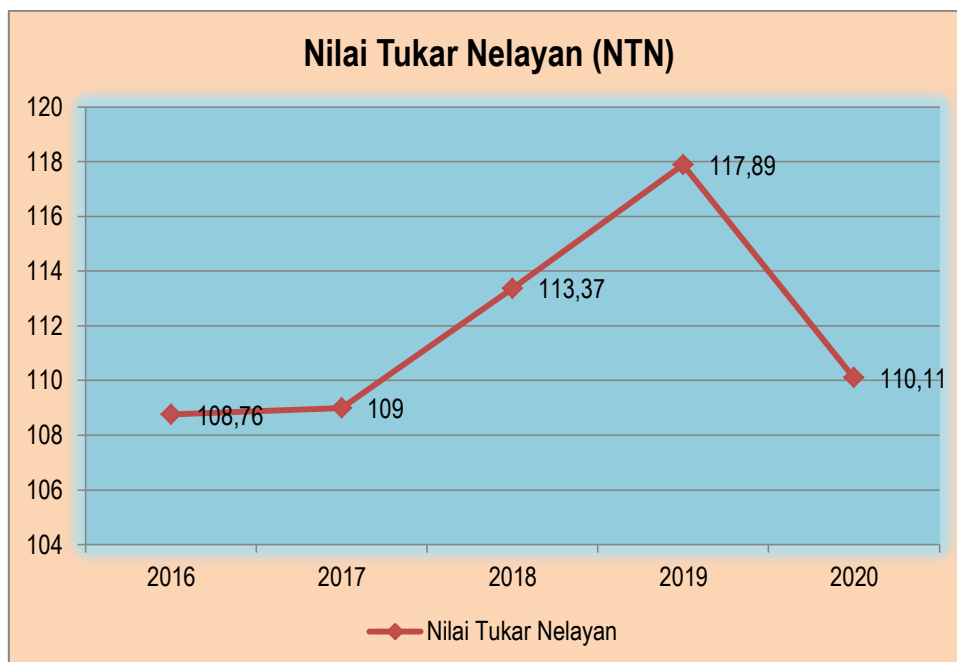
**a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)**

Pada tahun 2020 ditargetkan nilai tukar nelayan sebesar 107,20, capaian kinerja sebesar 110,11 dengan persentase 102,71%, ada penurunan sebesar 6,60% dari 117,89 tahun 2019 menjadi 110,11 tahun 2020. Penurunan ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemic COVID-19, yang mengakibatkan anggaran untuk penunjang peningkatan produksi perikanan tangkap berupa sarana dan parsana dipangkas, selain itu pasar juga terimbas dengan melemahnya daya beli masyarakat dan pembatasan jalur perdagangan antar pulau, sehingga nelayan juga mengurangi volume melautnya.

Walau pada tahun 2020 terjadi penurunan akan tetapi indek Nilai Tukar Nelayan masih >100 yang berarti nelayan mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

Perkembangan nilai tukar nelayan selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

**Grafik 3.1.**  
**Perkembangan Nilai Tukar Nelayan dari Tahun 2016 – 2020**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**



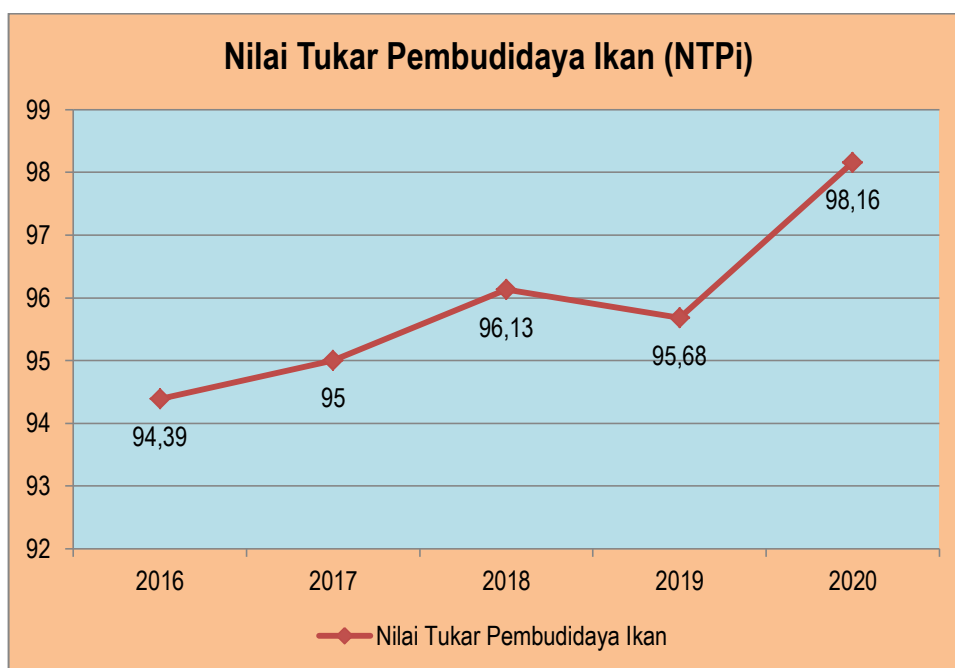
## b. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Pada tahun 2020 ditargetkan nilai tukar pembudidaya ikan sebesar 98,60, capaian kinerja sebesar 98,16 dengan persentase 99,55%, walau belum memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun akan tetapi ada kenaikan sebesar 2,60% dari 95,68 tahun 2019 menjadi 98,16 tahun 2020. Tidak terpenuhi target ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemic COVID-19, yang mengakibatkan anggaran untuk penunjang peningkatan produksi budidaya perikanan berupa sarana dan parsana dipangkas, selain itu pasar juga terimbas dengan melemahnya daya beli masyarakat.

Walau pada tahun 2020 terjadi peningkatan akan tetapi indeks Nilai Tukar Pembudidaya Ikan masih <100 yang berarti pembudidaya ikan mengalami defisit. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani lebih kecil dari pengeluarannya.

Perkembangan nilai tukar pembudidaya ikan selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

**Grafik 3.2.**  
**Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan dari Tahun 2016 – 2020**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**



## 2) Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan

Produksi merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan/menghasilkan atau menambah nilai guna terhadap suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan (Organisasi/Produsen).

Persentase peningkatan volume produksi perikanan merupakan gabungan dari produksi perikanan tangkap dan budidaya, pada tahun 2020 capaian kinerja produksi perikanan belum

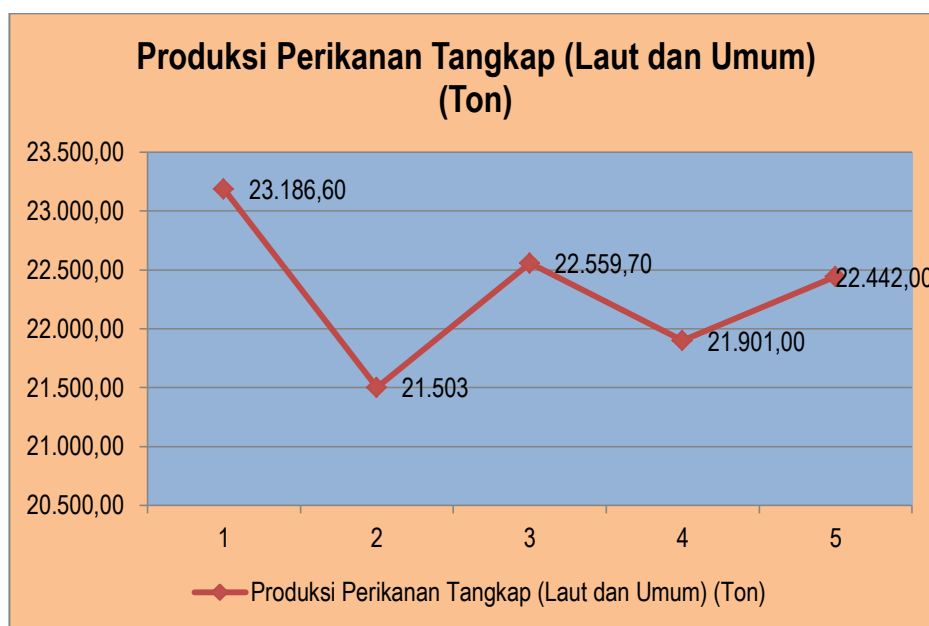
memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 3%, dari capaian kinerja sebesar 1,62%. Rincian indicator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Jumlah produksi perikanan tangkap (perairan laut dan perairan umum)**

Produksi Perikanan Tangkap merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi penangkapan nelayan, produksi yang didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Realisasi produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) tahun 2020 adalah sebanyak 22.442 ton atau 83,48% dari target yang telah ditetapkan sebesar 26.884 ton. Dibandingkan dengan jumlah produksi perikanan tangkap ditahun 2019 sebesar 21.901 ton, mengalami kenaikan sebesar 541 ton atau naik sebesar 2,47%.

Menarik untuk diketahui laju perkembangan jumlah (volume) hasil tangkapan ikan selama lima tahun terakhir dari 2016 –2020 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

**Grafik. 3.3.**  
**Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**  
**Dari Tahun 2016 – 2020**



Kinerja (produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum) Dinas Perikanan pada tahun 2020 tidak dapat memenuhi Target sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020. Hal ini tidak lepas dari permasalahan yang ada, terutama permasalahan yang tidak terduga, permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

- a. Adanya revitalisasi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Trawl/pukat) dengan alat tangkap yang ramah lingkungan dan diperbolehkan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga masyarakat/nelayan belum terbiasa dalam penggunaannya.
- b. Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan secara teknis nelayan dalam penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dibantu oleh pemerintah, karena rata-rata nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebahagian besar masih berusaha secara tradisional.
- c. Kurangnya permodalan yang dapat disediakan dan belum dapat berkembangnya investor yang berusaha dibidang perikanan secara profesional.
- d. Telah terjadinya indikasi *over fishing* di daerah penangkapan utama, yang berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan.
- e. Adanya indikasi pencemaran lingkungan, baik yang berasal dari sampah rumah tangga maupun industry.
- f. Terjadi pandemic COVID-19, dimana imbas dari pandemic ini melumpuhkan semua sector ekonomi, khususnya sector perikanan.

Tidak tercapainya Indikator Kinerja Dinas pada tahun 2020 tersebut, yang paling utama disebabkan karena kondisi alam (Eksternal) yang tidak dapat diduga, karena sumberdaya perikanan dan kelautan merupakan sumberdaya yang sangat tergantung oleh banyak faktor, mulai dari lingkungan, kualitas air, sarana dan prasarana infrastruktur penunjang lainnya, sehingga capaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

Solusi/pemecahan masalah yang dirasa bisa mengatasi hal tersebut adalah :

- a. Dengan adanya revitalisasi alat tangkap ini secara langsung sangat dirasakan berkurangnya jumlah penangkapan, akan tetapi kalau tidak diterapkan pada saat ini dipastikan sumberdaya ikan dan lingkungannya akan rusak, dengan adanya revitalisasi ini diharapkan sumberdaya ikan dan lingkungan dapat berkembang dan pada tahun depan dapat meningkat produksinya.
- b. Perlu adanya pelatihan khusus kepada nelayan, khususnya nahkoda, dikarenakan masih banyak nahkoda kapal penangkapan ikan yang tidak memiliki sertifikasi kenahkodaan, sehingga dalam penggunaan sarana dan prasarana masih banyak yang belum bisa memanfaatkan secara optimal.
- c. Mulai tahun 2017 telah dilakukan kredit ringan kepada nelayan, dan sampai saat ini masih dilakukan pendataan kepada nelayan, sehingga diharapkan dengan adanya pendataan ini

dan masyarakat nelayan telah mendapatkan kartu KUSUKA, akses permodalan melalui Bank dapat dengan mudah didapatkan, sehingga nelayan tidak lagi tergantung pada “rentenir”.

- d. Perlu adanya revitalisasi mangrove, dimana mangrove merupakan sebagai nursery ground bagi sebahagian sumberdaya ikan, sehingga diharapkan dengan adanya revitalisasi mangrove ikan dapat berkembang kembali secara normal.
- e. Perlu adanya pencegahan melalui sosialisasi akan pentingnya menjaga lingkungan.

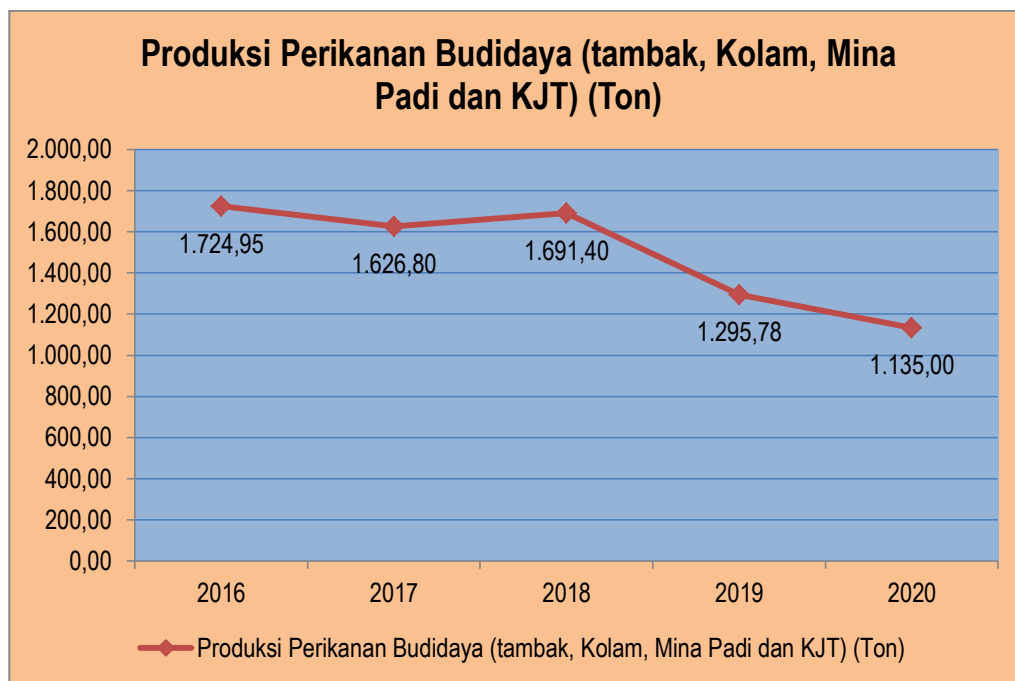
#### **b. Jumlah Produksi Budidaya Perikanan**

Target produksi perikanan budidaya yang diperkuat dengan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) tahun 2020 sebesar 2.150 Ton. Capaian produksi perikanan budidaya tahun 2020 sebesar 1.135 Ton atau capaian (52,79%) dari target sebesar 2.150 Ton. Di tahun 2020 ini sebenarnya produksi perikanan budidaya bisa lebih dari capaian yang ada, akan tetapi banyak faktor yang mempengaruhi belum tercapainya hasil maksimal produksi perikanan budidaya disebabkan karena cukup banyaknya lahan budidaya, khususnya tambak beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Sebahagian besar lahan tambak masyarakat masih bersifat tradisional dalam pemanfaatannya, sehingga apabila terjadi pasang tinggi air akan masuk kedalam tambak dikarenakan tanggul tambak pembuatannya masih secara manual, sehingga tanggul tidak kuat menahan air dan menyebabkan ikan yang ditebar akan terbawa arus air selain itu pada tahun 2020 diperparah dengan adanya pandemic COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dimana dengan adanya pandemic ini segala aktivitas perekonomian sangat terimbas dan terjadinya pelemahan daya beli masyarakat. Pada tahun 2017 terjadi perubahan nomenklatur yang semula Dinas Perikanan merupakan dinas dengan typelogi A, menjadi dinas dengan typelogi C, yang artinya anggarannya pun lebih kecil daripada typelogi sebelumnya.

Jumlah produksi perikanan budidaya selama lima tahun terakhir dilihat dari per jenis media Budidaya tahun 2016 – 2020 dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :



**Grafik 3.4..  
Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya  
Dari Tahun 2016 – 2020**



Dilihat dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 2016– 2017 produksi perikanan budidaya perikanan mengalami trend penurunan akan tetapi pada tahun 2018 mengalami kenaikan, dan pada tahun 2018-2020 produksi perikanan budidaya terus mengalami tren penurunan, hal ini disebabkan karena banyaknya tambak yang berubah fungsi menjadi kebun tanaman tahunan, akan tetapi mulai tahun 2016 Dinas Perikanan telah mencoba untuk memberikan pengertian kepada masyarakat melalui pelatihan budidaya ikan, sosialisasi, pelatihan manajemen KUB dan bantuan sarana dan prasarana budidaya tambak, dengan demikian secara langsung dan bertahap produksi perikanan budidaya tambak mulai menunjukkan kenaikan, walau belum signifikan, diharapkan kedepan produksi perikanan budidaya tambak bisa meningkat sesuai yang ditargetkan.

Kinerja produksi perikanan budidaya (Tambak, Kolam, KJA/KJT/Mina Padi) Dinas Perikanan pada tahun 2020 tidak dapat memenuhi Target sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020. Hal ini tidak lepas dari permasalahan yang ada, terutama permasalahan yang tidak terduga, permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

- a. Banyaknya luasan lahan budidaya tambak yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian maupun perkebunan.

- b. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat pembudidaya ikan, dimana sebagian besar masyarakat pembudidaya masih menggunakan cara tradisional dalam system budidaya ikan.
- c. Terhambatnya bantuan ikan dan pakan kepada masyarakat, dikarenakan kebanyakan Kelompok Pembudidaya Ikan yang ada tidak memenuhi kriteria dalam peraturan yang ada, yang diharuskan pada kelompok untuk berbadan hukum.
- d. Terbatasnya permodalan bagi pembudidaya ikan.
- e. Pasar yang belum pasti, sehingga masyarakat pembudidaya ikan masih ragu dalam pembudidaya ikan dalam skala besar.
- f. terjadi pandemic COVID-19, dimana imbas dari pandemic ini melumpuhkan semua sector ekonomi, khususnya sector perikanan.

Solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut untuk peningkatan produksi perikanan budidaya adalah :

- a. Mendorong kembali kepada masyarakat pembudidaya ikan, khususnya pembudidaya ikan tambak untuk berusaha kembali budidaya ikan, dengan cara memberikan bantuan stimulant kepada masyarakat untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berusaha budidaya ikan kembali.
- b. Memberikan pelatihan secara bertahap tentang cara budidaya ikan yang baik dan benar.
- c. Untuk diperhatikan bahwasannya terlambatnya bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya merupakan permasalahan klasik yang hampir tiap tahun, sehingga diharapkan pada tahun yang akan datang dapat dilaksanakan dengan segera, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan cepat.

### 3) **Persentase Peningkatan Jumlah Konsumsi Ikan**

Angka konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun, mengenai perhitungan konsumsi ikan ini Dinas Perikanan menggunakan metode survey konsumen (*Consumer Panels*). Survey dilakukan dengan cara metode sampling. Populasi distratifikasi untuk memperoleh responden berdasarkan pendapatan, umur dan lokasi. Melalui penghitungan dengan metode ini akan diperoleh informasi mengenai jenis ikan yang dikonsumsi, tempat ikan dikonsumsi (di dalam Rumah Tangga atau di luar rumah tangga), pola preferensi konsumen dan lainnya.

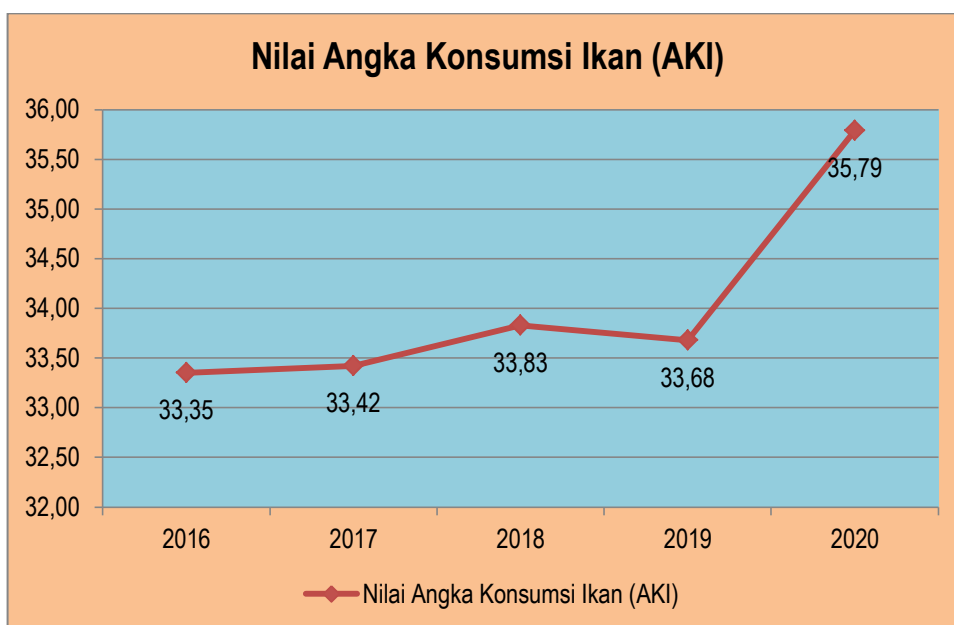
Target persentase peningkatan konsumsi ikan yang diperkuat dengan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) tahun 2020 sebesar 3%. Capaian persentase peningkatan konsumsi ikan tahun 2020 sebesar 6,25% atau capaian (208,67%) dari target sebesar 3%. Dengan mengetahui besarnya

angka konsumsi ikan maka dapat diketahui besarnya kebutuhan ikan serta mengetahui jenis ikan yang dibutuhkan oleh suatu daerah/wilayah.

Untuk perhitungan konsumsi ikan Pada tahun 2020, capaian rata-rata konsumsi ikan per kapita daerah adalah sebesar 35,79 kg/kapita, atau tercapai 105,48% dari target yang telah ditetapkan sebesar 33,93. Rata-rata konsumsi ikan per kapita daerah pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan sebesar 6,27% bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 33,68 Kg/Kapita/Tahun.

Nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :

**Grafik 3.5.**  
**Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Tanjung jabung Barat**  
**Tahun 2016 – 2020**



Untuk mendukung peningkatan konsumsi ikan, telah diinisiasi berbagai program/kegiatan pembangunan yang dititik beratkan pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu menjamin dan mendukung penguatan ketersediaan (*supply*) hasil perikanan, terutama pada peningkatan produksi perikanan dan pengolahan hasil perikanan, mendukung kemudahan masyarakat dalam menjangkau (*accessibility*) hasil perikanan, serta mendorong peningkatan konsumsi (*consumption*) hasil perikanan.

Beberapa program yang dapat mendorong tingkat konsumsi yang sudah diinisiasi dan dilaksanakan yakni:

1. Untuk menjamin dan mendukung penguatan ketersediaan (*supply*) hasil perikanan, terutama pada peningkatan produksi perikanan dan pengolahan hasil perikanan, Dinas Perikanan telah

menginisiasi program dan kegiatan berupa penguatan armada penangkapan ikan, pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

2. Untuk menjamin kemudahan masyarakat dalam menjangkau (*accessibility*) hasil perikanan. Dinas Perikanan telah menginisiasi program dan kegiatan berupa pembangunan pasar ikan (dana APBN), rehabilitasi pasar tradisional dan penguatan penanganan pasca penangkapan/panen dengan pembangunan pabrik es.
3. Untuk menjamin peningkatan konsumsi (*consumption*) hasil perikanan. Dinas Perikanan telah menginisiasi program dan kegiatan dengan pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan).

#### 4) **Persentase Peningkatan Kelas Kelompok dari Pemula menjadi Madya**

Target persentase peningkatan kelas kelompok dari pemula menjadi madya tahun 2020 sebesar 30%. Capaian persentase peningkatan kelas kelompok dari peula menjadi madya tahun 2020 sebesar 25% atau capaian (83,33%) dari target sebesar 30%.

Capaian peningkatan kelas kelompok dari pemula menjadi madya tahun 2020 ini tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan anggaran untuk pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok usaha perikanan (Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan) dipangkas hamper 90% untuk percepatan penanganan COVID-19, dan hanya ada dua kegiatan yang dilaksanakan, yaitu pembinaan nelayan dan pembinaan pengolah.

Jumlah kelompok nelayan sampai dengan tahun 2020 berjumlah....orang dan kelompok yang sudah mandiri (Madya) sebanyak.....orang, sedangkan jumlah kelompok pembudidaya ikan sampai dengan tahun 2020 sebanyak....orsng Dan yang sudah mandiri sebanyak..... orang.

### 3.4.2. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

IKU terkait manajerial Perangkat Daerah diukur oleh tiga indikator, yaitu 1) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Perikanan, 2) Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan dan 3). Nilai AKIP Dinas Perikanan. Keterangan terinci mengenai evaluasi ketiga indikator tersebut diuraikan sebagai berikut :

#### 1. **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Perikanan**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa setiap unit kerja di instansi pemerintah yang berinteraksi langsung dengan publik wajib untuk mengadakan survei atau jajak pendapat terkait layanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan. Survei ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan layanan masyarakat yang disediakan, kecepatan waktu layanan, kesesuaian layanan yang diberikan, perilaku petugas layanan, dan sarana prasarana layanan publik yang diberikan.

Pada tahun 2020 ini merupakan awal pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Dinas Perikanan yang dilaksanakan pada Agustus 2020, pelaksanaan ini baru sebatas internal dan beberapa kelompok nelayan, akan tetapi dari awal pelaksanaan ini respon masyarakat, khususnya nelayan sangat baik, dengan target rata-rata nilai 3,50 tercapai 3,12 yang berarti "BAIK" atau sebesar 89,14% dari target yang telah ditetapkan.

## **2. Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan**

Indikator kinerja ini adalah untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan Internal (Inspektorat) dan Eksternal BPK-RI dan BPKP-RI) yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan jumlah temuan. Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan persentase temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **3. Nilai AKIP Dinas Perikanan**

Nilai AKIP Dinas Perikanan tahun 2020 sebesar 68,86 (kategori Baik) dari target nilai 65 atau tercapai sebesar 105,93%. Nilai AKIP tersebut masih sama dari tahun 2019 dengan kategori Baik (nilai B).

## **3.5. Akuntabilitas Keuangan**

### **3.5.1. Kinerja Anggaran Dinas Perikanan**

#### **A. APBD II dan DAK**

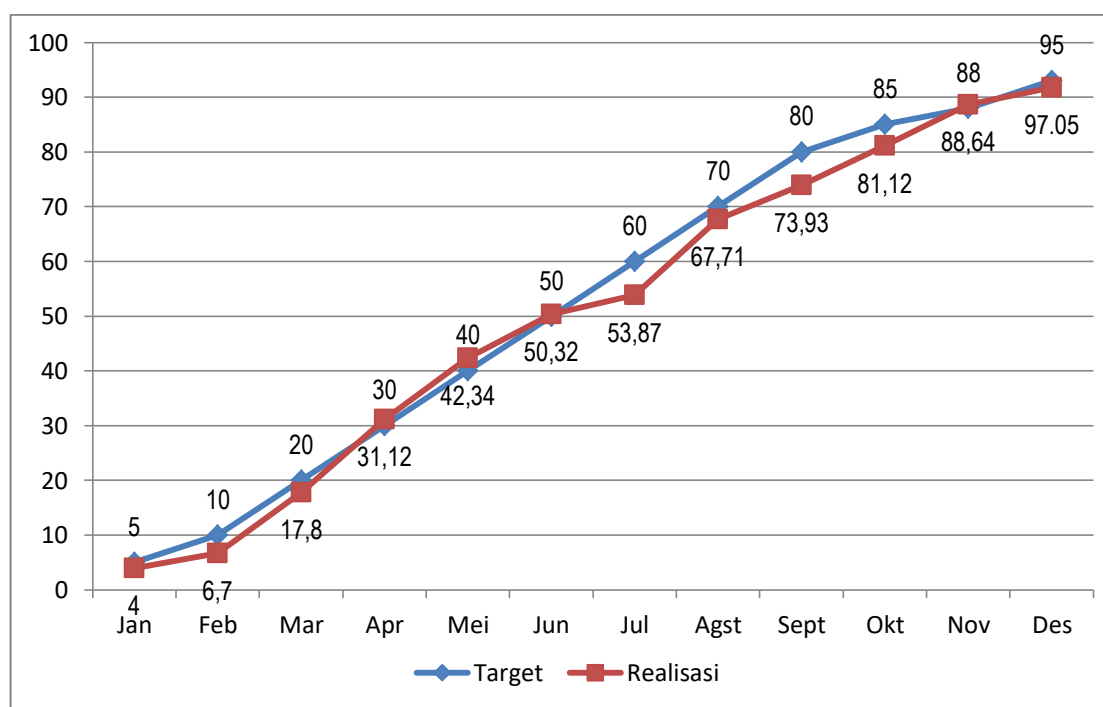
Di tahun 2020 realisasi keuangan (Khususnya Belanja Langsung) ditargetkan mencapai 95%, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sampai dengan akhir tahun 2020 realisasi keuangan mencapai angka sebesar Rp. 4.305.299.592,- atau 97,05% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.438.341.571,- telah memenuhi angka target, capaian fisiknya mencapai 98,88% yang dikategorikan sebagai "Sangat Baik".

Tabel 3.3. Rincian Anggaran dan Capaian Keuangan Dinas Perikanan Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Belanja Tidak Langsung	2.729.599.500	2.636.208.090	96,58
2.	Belanja Langsung	4.438.341.571	4.305.299.592	97,05
<b>Jumlah</b>		<b>7.167.941.071</b>	<b>6.941.507.682</b>	<b>96,84</b>

Jika diurai per bulannya, target dan rencana penyerapan dan realisasi anggaran Dinas Perikanan (khususnya Belanja Langsung) setiap bulannya selama tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 3.1. di bawah ini.

**Grafik 3.6.**  
**Grafik Pola Penyerapan Anggaran Tahun 2020**



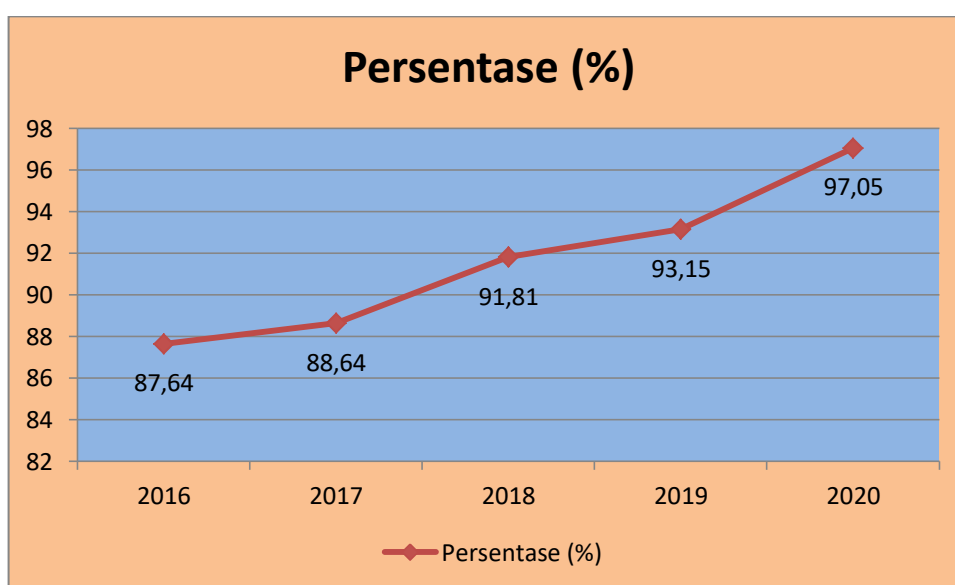
Tingkat kinerja keuangan (Belanja Langsung) tahun 2020 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tingkat penyerapan tahun 2019 sebesar 93,15% yakni mengalami peningkatan sebesar 4,19% atau sebesar 97,05% pada tahun 2020. Namun dilihat pola penyerapan hampir sama dengan tahun 2019 dengan ciri penyerapan mulai melaju cepat pada akhir Triwulan III yaitu pada Oktober.

Kinerja keuangan Dinas Perikanan selama 2016-2020, menunjukkan jumlah pagu anggaran (Belanja Langsung) mengalami fluktuasi. Untuk lebih jelasnya gambaran anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2016 – 2020 dapat dilihat dalam Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4. Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2014 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pagu (Milyar)	3.735.162.654	6.504.371.350	5.374.776.400	5.034.541.635	4.438.341.571
Realisasi (milyar)	3.273.329.139	5.765.543.199	4.934.818.529	4.689.881.676	4.305.299.592
Persentase (%)	87,64	88,64	91,81	93,15	97,05

Grafik 3.7.  
Grafik Pertumbuhan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan  
Tahun 2016 - 2020



Pagu anggaran Dinas Perikanan Tahun 2020 bersumber dari APBD II dan DAK berupa Rupiah Murni berupa Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.729.599.500,-, Belanja Langsung sebesar Rp. 4.438.341.571,- (termasuk dana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan). Pagu anggaran ini dialokasikan untuk 3 (tiga) bidang yang rinciannya dapat dilihat dalam Tabel 3.5. sebagai berikut :

Tabel 3.5. Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2020

NO	BIDANG	PAGU (Rp)	PROPORSI	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.729.599.500,00</b>	<b>38,08</b>	<b>2.636.208.592,00</b>	<b>96,58</b>
1.	Dinas Perikanan	2.729.599.500,00	38,08	2.636.208.592,00	96,58
<b>II.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.438.341.571,00</b>	<b>61,92</b>	<b>4.305.299.592,00</b>	<b>97,05</b>
1.	Sekretariat	1.036.472.301,00	14,46	999.839.882,00	96,47
2.	Budidaya	1.098.965.000,00	15,33	1.032.275.790,00	93,93
3.	Tangkap	2.302.904.270,00	32,13	2.273.183.920,00	98,71
<b>Jumlah I + II</b>		<b>7.167.941.071,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.941.508.184,00</b>	<b>96,84</b>

### 3.5.2. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Berdasarkan analisis keuangan terhadap kegiatan belanja langsung pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat disimpulkan bahwa secara umum keuangan dapat terserap dengan baik. Meskipun terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (*silpa*) tetapi hal tersebut lebih merupakan bentuk efisiensi anggaran dan tidak mempengaruhi capaian kinerja hasil (*outcome*). Secara rinci analisis pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.17 sebagai berikut :



Tabel 3.6. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian Kegiatan	Sebelum Anggaran	Setelah Perubahan	Proporsi	Daya serap Keuangan		Fisik	Sisa Anggaran
					Rp.	%		
01	<b>Program Pelayanan Administrasi Keuangan</b>	<b>778.289.656</b>	<b>731.847.301</b>	<b>16,49</b>	<b>717.884.298</b>	<b>98,09</b>	<b>100,00</b>	<b>13.963.003</b>
	01 Penyediaan jasa surat menyurat	3.405.000	1.701.000		1.100.000	64,67	100,00	601.000
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	55.000.000	48.320.000		45.195.956	93,53	100,00	3.124.044
	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	110.000.000	110.000.000		109.900.000	99,91	100,00	100.000
	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.579.842	6.786.487		6.762.247	99,64	100,00	24.240
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	53.612.214	53.612.214		53.564.781	99,91	100,00	47.433
	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.500.000	14.260.000		9.730.000	68,23	100,00	4.530.000
	12 Penyediaan komponen instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.992.600	967.600		967.600	100,00	100,00	0
	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	9.000.000		8.338.000	92,64	100,00	662.000
	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	4.200.000	4.200.000		1.395.000	33,21	100,00	2.805.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	513.000.000	483.000.000		480.930.714	99,57	100,00	2.069.286	
02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>351.000.000</b>	<b>213.500.000</b>	<b>4,81</b>	<b>194.732.084</b>	<b>91,21</b>	<b>100,00</b>	<b>18.767.916</b>
	09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000	12.500.000		12.200.000	97,60	100,00	300.000
	12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	25.000.000	7.000.000		6.900.000	98,57	100,00	100.000
	20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	13.500.000		12.000.000	88,89	100,00	1.500.000
	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	243.000.000	168.450.000		151.782.084	90,11	100,00	16.667.916
	26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	18.000.000	12.050.000		11.850.000	98,34	100,00	200.000
	32 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	20.000.000	0		0	0,00	0,00	0
03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>0,61</b>	<b>23.743.500</b>	<b>87,94</b>	<b>100,00</b>	<b>3.256.500</b>
	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	27.000.000	27.000.000		23.743.500	87,94	100,00	3.256.500
05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	05 Pengembangan SDM	55.000.000	0		0	0,00	0,00	0

06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>72.500.000</b>	<b>64.125.000</b>	<b>1,44</b>	<b>63.480.000</b>	<b>98,99</b>	<b>100,00</b>	<b>645.000</b>
	01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	35.000.000	26.625.000		26.005.000	97,67	100,00	620.000
	17 Pengumpulan dan Pengolahan Data-Data Statistik Perikanan	37.500.000	37.500.000		37.475.000	99,93	100,00	25.000
20	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	<b>1.455.630.000</b>	<b>1.098.965.000</b>	<b>24,76</b>	<b>1.032.675.790</b>	<b>93,97</b>	<b>100,00</b>	<b>66.289.210</b>
	04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan	456.310.000	455.310.000		452.338.700	99,35	100,00	2.971.300
	05 Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Air Payau	53.350.000	33.000.000		32.968.000	99,90	100,00	32.000
	06 Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan Budidaya	145.500.000	20.475.000		19.800.000	96,70	100,00	675.000
	07 Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) Pembengis dan UPBAP Tj. Labu	223.000.000	211.685.000		210.152.600	99,28	100,00	1.532.400
	08 Pengawasan Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan	29.900.000	23.200.000		21.050.000	90,73	100,00	2.150.000
	09 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan POKDAKAN	44.800.000	17.525.000		16.500.000	94,15	100,00	1.025.000
	10 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar dan Air Payau	68.750.000	41.250.000		41.075.500	99,58	100,00	174.500
	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaa Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil (DAK PENUGASAN)	434.020.000	296.520.000		238.790.990	80,53	100,00	57.729.010
21	<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>	<b>2.276.037.000</b>	<b>2.110.392.000</b>	<b>47,55</b>	<b>2.085.870.450</b>	<b>98,84</b>	<b>100,00</b>	<b>24.521.550</b>
	06 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	1.241.350.000	1.181.350.000		1.168.244.300	98,89	100,00	13.105.700
	07 Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan	131.490.000	38.845.000		38.345.000	98,71	100,00	500.000
	08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaa Usaha Nelayan Skala Kecil (DAK PENUGASAN)	903.197.000	890.197.000		879.281.150	98,77	100,00	10.915.850
23	<b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>	<b>248.387.500</b>	<b>66.435.000</b>	<b>1,50</b>	<b>62.925.000</b>	<b>94,72</b>	<b>100,00</b>	<b>3.510.000</b>
	02 Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan	112.437.500	59.625.000		56.325.000	94,47	100,00	3.300.000
	03 Promosi dan Publikasi Kegiatan Sektor Perikanan dan Kelautan	135.950.000	6.810.000		6.600.000	96,92	100,00	210.000
25	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>267.002.270</b>	<b>126.077.270</b>	<b>2,84</b>	<b>122.588.470</b>	<b>97,23</b>	<b>100,00</b>	<b>3.488.800</b>
	01 Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	124.000.000	9.925.000		8.250.000	83,12	100,00	1.675.000
	02 Pembinaan dan Pelestarian Sumberdaya Ikan	143.002.270	116.152.270		114.338.470	98,44	100,00	1.813.800
<b>JUMLAH</b>		<b>5.530.846.426</b>	<b>4.438.341.571</b>	<b>100</b>	<b>4.305.299.592</b>	<b>97,05</b>	<b>100,00</b>	<b>134.441.979</b>

## BAB IV PENUTUP

Secara umum capaian kinerja Dinas Perikanan tahun 2020 telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, dilihat dari capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, walau ada beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target, hal ini disebabkan adanya faktor-faktor eksternal berupa terjadinya pandemic COVID-19, dimana ada refofusing anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19. Dan melemahnya pasar. Sedangkan untuk capaian keuangannya Dinas Perikanan tahun 2020 sebesar 97,05% naik bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 yang sebesar 93,15% atau kenaikan sebesar 4,19%.

Dari analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dan mengacu pada target Perangkat Daerah, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Dari lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada tahun 2020 ada dua indikator yang melebihi target, sedangkan tiga indikator tidak memenuhi target. Kendala dan permasalahan yang dihadapi yang menyebabkan tidak tercapainya target kedua indikator kinerja tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.
2. Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, Dinas Perikanan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dilihat dari capaian beberapa indikator kinerja, walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
3. Capaian indikator kinerja Dinas Perikanan tahun 2020 juga didukung dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan yang cukup besar dalam Program Pemberdayaan Masyarakat skala kecil pembudidaya dan nelayan.

LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, di bidang Perikanan dan Kelautan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*).

Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 ini belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LAKIP sangat diharapkan sehingga LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun-tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik.

***“Perencanaan yang baik bukan berarti segala-galanya, Tetapi  
Tanpa perencanaan yang baik, segala-galanya menjadi tidak berarti”***

Kuala Tungkal, Januari 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Ir. NETTY MARTINI, M.Sc.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650913 199703 2 001





# LAMPIRAN

